

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena itu mutlak diperlukan. Anak yang baru lahir pun memerlukan pendidikan, bahkan masih dalam kandungan ibunya. Sifat dan kepribadian seorang anak ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan beberapa latihan yang dialami sejak masih kecil. Pendidikan merupakan suatu bekal untuk menjalani hidup dan tuntunan kejiwaan.¹

Pendidikan dimaknai sebagai upaya manusia dalam mencapai aktualisasi diri yaitu dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Seluruh rangkaian proses yang mengarah pada pengoptimalan potensi manusia tanpa memandang tempat dan waktu disebut sebagai kegiatan pendidikan.

Semakin canggihnya ilmu pengetahuan membuat pendidikan menghadapi banyak sekali tuntutan. Jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menawarkan kemudahan dalam segala aspek kehidupan tidak digunakan dengan semestinya, maka akan membuka peluang untuk melakukan tindak kejahatan.²

¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000), 53.

² Muhammad Muhyidin, *Mengajar Anak Berakhlak Al-Qur'an*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 17.

Hasil dari penelitian berbagai bidang ilmu, Bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Segala macam permasalahan tersebut berpangkal dari menurunnya nilai akhlak atau moral. Beberapa pihak menyatakan bahwa penyebab dari timbulnya dekadensi moral (penurunan nilai akhlak) tersebut adalah karena gagalnya pendidikan agama dalam mewujudkan output yang berbudi pekerti luhur.³

Melihat situasi sekarang ini, kegelisahan umat Islam menghadapi kemajuan teknologi yang menciptakan era modernitas merupakan problematika besar. Lembaga pendidikan Islam dituntut harus bisa *survive* dengan gaya kehidupan modern dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia berusaha mencari berbagai inovasi baru untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam dengan segenap eksperimennya yang cukup signifikan, yakni sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan nasional.⁴

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang paling efektif dalam membentuk moral (berupa akhlakul karimah) anak bangsa adalah pondok pesantren. Lembaga ini merupakan warisan para Ulama terdahulu sebagai pendongkrak keberhasilan penyebaran ajaran Islam di bumi Nusantara ini.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Zamakhsyari Dhofier dengan mengutip A. Jhons menyebutkan, tradisi pesantren sudah dimulai sejak abad ke-12 M yang ditandai dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam yang membawa dampak bagi perkembangan dan

³ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amisisco, 1996), 74.

⁴ A. Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 247.

penyebaran Islam di Indonesia.⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lahirnya pesantren berbanding lurus dengan perkembangan Islam di Indonesia.

Walaupun zaman semakin maju dan berkembang, pesantren tidak kehilangan jadi dirinya sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam. Proses pembentukan moral di dalam pesantren yakni mempelajari, memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam dengan moral keagamaan sebagai pedoman perilaku. Adapun kata “Tradisional” ini bukan termasuk kata-kata yang lama atau kuno tetapi menjadi bagian yang mendalam bagi kehidupan umat Islam, yang sudah lama mengalami perubahan masa demi masa.⁶

Meskipun pada awal berdirinya, belum diakui kontribusinya dalam pendidikan formal di Indonesia, dan belum mendapat pengakuan yang legal (diakui sebagai lembaga pendidikan non-formal)⁷, kekhasan yang dimilikinya tetap diakui oleh beberapa ahli sebagai lembaga pendidikan yang sangat dinamis terutama dalam merespon perubahan sosial.

Sebagian pesantren lain memang dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sekitar dengan memberikan pendidikan agama yang baik, toleran (*tasammuh*) dan mendamaikan (*rahmat*) bagi sekitarnya. Namun hal itu masih sebatas di wilayah-wilayah basis muslim. Seperti data pesantren dari Kementerian Agama menyebutkan, jumlah pesantren terbanyak yaitu di Jawa Barat dengan 7.624 pesantren atau 28% dari jumlah Pesantren di Indonesia.

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 36.

⁶ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta:INIS, 1994), 51

⁷ Yasin, *Dimensi-dimensi...*, 249.

Menyusul berikutnya Jawa Tengah dengan 4.276 (15,70%) pesantren dan Banten 3.500 (12,85%) pesantren.⁸

Jumlah pesantren yang cukup besar di atas adalah hal yang wajar karena Jawa merupakan daerah basis muslim. Jawa Barat misalnya, jumlah penduduk muslimnya mencapai 20,2 % dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa. Provinsi Jawa Timur sebanyak 17,4% dan provinsi Jawa Tengah 15,1% penduduk muslim.⁹ Artinya, jika pesantren terlahir di wilayah-wilayah muslim mayoritas maka hal ini adalah sesuatu yang wajar karena sejalan dengan jumlah penduduknya.

Sejarahnya pesantren di masa lalu mampu mencetak kader-kader yang handal. Seperti pertama munculnya pesantren, pada kepemimpinan wali Songo mampu mencetak kader-kader seperti Sunan Bonang (seniman), Sunan Kudus (*fuqoha*), Sunan Gunung Jati (ahli strategi perang), Sunan Drajat (ekonomi), Raden Fatah (politikus), Sunan Kalijaga (budaya) dan begitu juga lainnya.¹⁰

Sejak awal didirikannya di Indonesia dari zaman walisongo hingga sekarang, sebutan pesantren di masyarakat adalah pondok pesantren salafiyah (tradisional). Istilah salafiyah artinya adalah lembaga pendidikan Islam yang sistem pembelajarannya masih mempertahankan ciri khas pendidikan pada

⁸ Kementerian Agama RI, *Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012*, <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

⁹ Avatarista, *Penduduk dan agama di Indonesia*, <http://pendis.kemenag.go.Id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf> Diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

¹⁰ Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2006), 17

masa walisongo. Adapun kegiatannya meliputi sorogan (membaca Al-Qur'an yang disimak oleh Ustadz/Kiai), pembelajaran kitab kuning, pemaknaan arab pegon (jawa), dan lain-lain.

Semakin berkembangnya zaman, menimbulkan adanya tuntutan dari masyarakat yang sifatnya variatif. Hal ini membuat pondok pesantren khususnya salafiyah untuk bisa progresif dan mengembangkan sistem di dalamnya untuk bisa menyesuaikan dengan modernisasi. Hal ini meliputi aspek kelembagaan, kurikulum, aspek pembelajaran dan fungsional pesantren.

Seiring dengan pesatnya perubahan sosial akibat modernisasi, pesantren harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut dengan adanya respon dan reaksi aktif. Selain itu, pesantren juga selalu dituntut untuk melakukan pengaturan secara kompleks dan penyesuaian kembali mulai dari melakukan pembaharuan dan pengembangan program dengan membuat yayasan, memasukkan sistem sekolah formal, dan modernisasi manajemen pengelolaan.¹¹

Dengan melakukan transformasi (pengembangan) maka pesantren akan terus survive dalam mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisinya. Dasar yang digunakan Umat Islam untuk melakukan pembaruan dan perubahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

¹¹ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 17-18

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ۝ ١١٧

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan”.¹² (QS Huud : 117)

Penjelasan ayat tersebut adalah Orientasi pembaruan tidak hanya menuju keadaan yang lebih baik ke depan, tetapi juga berorientasi kepada sesuatu yang diidealkan pada masa lalu (pemurnian). Selain itu, Peran seorang pemimpin sangat menentukan efektivitasnya perkembangan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren. Dalam hal ini, seorang Kiai adalah pemilik, pengelola dan sekaligus pengajar di pesantren yang beliau pimpin. Kepemimpinan Kiai merupakan tokoh sentral yang berada di pondok pesantren dan memiliki ciri khas yang tersendiri dibandingkan dengan tokoh pendidikan yang lain. Dalam mengembangkan pesantrennya, tentunya Kiai mempunyai strategi yang disesuaikan dengan kapasitas keilmuannya dan kondisi lingkungan pesantren.

Posisi pesantren dalam pendidikan di Indonesia sebagai pencetak generasi bangsa yang berakhlakul karimah tidak bisa lepas dari sosok yang disebut dengan Kiai. Dua hal ini yakni pesantren dan Kiai adalah hal yang tidak bisa dilepaskan (saling keterkaitan). Kepemimpinan dalam pondok pesantren dipegang oleh Kiai (pimpinan utama) dibantu oleh keluarga dekatnya atau sering disebut dengan dzurriyah pondok.

¹² Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *At-Tanzil Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30*, terj. Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008).

Kemampuan pesantren untuk tetap bertahan karena karakter eksistensinya, yang dalam bahasa Nurcholis Madjid disebut sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous).¹³ Penyelenggaraan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan Kiai dibantu beberapa ustadz yang hidup bersama di tengah para santri, dengan bangunan masjid sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan dan sekaligus tempat belajar mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri. Mereka hidup bersama-sama antara kiai, ustadz, santri serta pengasuh lainnya, sebagai satu keluarga besar.¹⁴ Dalam sebuah pesantren, kiai merupakan elemen yang paling esensial.

Kiai menguasai dan mengendalikan seluruh sektor kehidupan pesantren. Keberadaan seorang Kiai dalam lingkungan pesantren laksana jantung bagi kehidupan manusia.¹⁵ Ustadz, pengurus pondok, dan santri hanya dapat melakukan sesuatu tindakan di luar kebiasaan setelah mendapat restu dari Kiai. Beliau berhak menjatuhkan hukuman bagi santri-santrinya yang melanggar ketentuan-ketentuan titahnya menurut kaidah-kaidah normatif yang mentradisi di kalangan pesantren. Intensitas Kiai memperlihatkan peran yang sentralistik dan otoriter disebabkan karena Kiailah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin dan bahkan pemilik

¹³ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Proses Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 3

¹⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 6

¹⁵ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 63

tunggal sebuah pesantren. Secara kultural kedudukan ini sama dengan kedudukan bangsawan feodal yang biasa dikenal dengan nama kanjeng di pulau jawa.

Kiai dianggap memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain di sekitarnya. Oleh karenanya hampir setiap Kiai yang ternama beredar legenda tentang keampuhannya yang secara umum bersifat magis.¹⁶ Kiai betapapun tidak bisa begitu saja dipisahkan dari budaya feodalisme yang tumbuh di kalangan pesantren. Akhirnya tradisi feodalisme terasa sulit dihapus dari dalam pesantren itu sendiri.

Sebagai salah satu unsur dominan dalam kehidupan sebuah pesantren, Kiai mengatur irama perkembangan dan kelangsungan kehidupan pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, karismatik dan keterampilannya.¹⁷ Segala bentuk kebijakan penyelenggaraan pendidikan, baik menyangkut format kelembagaan berikut penjenjangannya, kurikulum yang dipakai acuan, metode pengajaran dan pendidikan yang diterapkannya, keterlibatan dalam aktivitas aktivitas di luar maupun sistem pendidikan yang diikuti adalah wewenang mutlak Kiai. Berkaitan dengan penentuan kebijakan (*policy*) pendidikan, pengajaran, lebih-lebih menyangkut aspek manajerial, pihak lain hanyalah sebagai pelengkap.¹⁸ Maka wajar bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan kepemimpinan pribadi Kiai.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (t.tp. CV. Dharma Bhakti, t.t), 20.

¹⁷ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 49

¹⁸ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Tarnsformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2004), 32

Banyak pesantren salafiyah (tradisional) yang berkembang pesat dengan mendirikan yayasan di dalamnya dan terdaftar sebagai pesantren muadalah. Adapun contoh pesantren salaf yang masih eksis di era modern ini seperti Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu dan Pondok Pesantren Darussalam Campurdarat Tulungagung

Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu adalah salah satu pesantren yang berada di Kabupaten Blitar. Letak pesantren berjarak kurang lebih 24 km dari kota Blitar. Lokasinya ada di Jl. Raya Manten Dusun Wonorejo Desa Slemanan Kecamatan Udanawu. Pesantren ini telah berdiri sejak tahun 1907 oleh KH. Abdul Ghofur. Dengan sistem pendidikan salaf yang masih kental, pesantren ini sangat masyhur di kalangan masyarakat Jawa Timur. Mamba'ul Hikam termasuk pesantren muadalah, karena ijazahnya setara dengan sekolah formal (SMA/MA). Lulusan dari pesantren ini bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi Islam baik negeri ataupun swasta.¹⁹

Sementara itu, Pondok Pesantren Darussalam Campurdarat Tulungagung adalah salah satu pesantren salaf yang tergolong masih baru dibandingkan dengan Mamba'ul Hikam. Terletak di Dusun Bandil Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Pesantren ini didirikan pada tahun 1995 oleh KH. Mukhoiri Husein yang juga merupakan pengasuh pondok hingga sekarang. Untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, pengasuh mendirikan yayasan dan sekolah formal (SMP dan SMK).²⁰

Hal yang menjadi menarik adalah upaya Kiai melalui kebijakannya yang strategik menghantarkan pesantren yang awalnya terkenal sebagai lembaga pendidikan yang terkesan kuno di mata masyarakat, menjadi sangat maju dan mampu menyesuaikan zaman. Dengan adanya perkembangan luar biasa dari pesantren salafiyah, mampu mendukung peningkatan dalam segala aspek khususnya mutu pendidikan pesantren Adapun keunikan-keunikan dari

¹⁹ Observasi di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar tanggal 16 Februari 2021

²⁰ Observasi di Ponpes Darussalam CampurdaratTulungagung tanggal 17 Februari 2021

kedua lembaga diatas sehingga penulis tertarik melaksanakan penelitian di lokasi tersebut adalah:²¹

- a. Kebijakan kiai terkait kurikulum pesantren yakni bersistem pendidikan salafiyah yang mampu *survive* di era modern ini. Sistem pendidikan salafnya tetap diterapkan oleh kedua pesantren ini dengan adanya kajian kitab kuning (karya ulama' kuno) di setiap harinya.
- b. Kebijakan kiai terkait sistem pembelajaran di kedua pesantren ini menekankan pada hafalan dan pembiasaan, contoh salah satunya yakni mewajibkan santrinya menghafal nadzom (utamanya nadom alfiyah bagi santri tingkat 'ulya), pembiasaan membaca kitab-kitab kuning klasik.
- c. Pengasuh pesantren (kiai) berkharismatik dengan kebijakannya yang mampu mempertahankan sistem pesantren salaf agar tetap eksis sehingga jumlah santri semakin bertambah.
- d. Salah satu kebijakan pengasuh Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu yakni menghantarkan pesantrennya menjadi pondok muadalah yang lulusannya bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi Islam baik negeri atau swasta. Pada intinya, ijazahnya setara dengan sekolah formal (SMA/MA).
- e. Salah satu kebijakan pengasuh Ponpes Darussalam Campurdarat yang tergolong pesantren salaf yaitu sudah melakukan pengembangan lembaga yakni dengan mendirikan yayasan. Dengan adanya yayasan tersebut didirikan pula sekolah formal SMP dan SMK.
- f. Hasil dari kebijakan kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu maupun Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung yakni beberapa santri memiliki prestasi dan mutu yang sangat baik. Dibuktikan dengan para alumni dari berbagai daerah di pulau Jawa dan Sumatera, yang sudah mampu mendirikan madrasah diniyah bahkan pondok pesantren.
- g. Salah satu kebijakan kiai yang menghimbau kepada para santrinya untuk mengikuti pengajian kitab kuning (*Bandongan/Balagh*) diluar jam sekolah formal/madrasah
- h. Adanya penanaman *leadership* (kepemimpinan) pada santri atas dasar kebijakan dari kiai yaitu melalui kegiatan organisasi pesantren, bahkan diikutsertakan dengan pelatihan kepemimpinan.

²¹ Observasi di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar dan Ponpes Darussalam CampurdaratTulungagung, tanggal 16-17 Februari 2021

Demikian adanya ulasan yang peneliti kemukakan menjadikan kedua pesantren tersebut peneliti anggap layak untuk diteliti dengan berpacu pada keunikan serta keunggulan yang dimiliki oleh kedua lembaga.

Beberapa keunggulan pesantren diatas, tidak lepas dari kebijakan Kiai yang progresif membuat kedua pondok pesantren tersebut mampu menyesuaikan diri (*survive*) di era modern ini. Dengan sistem pendidikan salaf yang menjadi ciri khas pesantren nusantara, juga mendidik para santri untuk mampu menghadapi budaya modern dan segala problematikanya jika sudah terjun di masyarakat. Adanya sekolah formal dan program muadalah pesantren, menunjukkan bahwa mutu pendidikan di kedua pesantren ini sangat terjamin. Oleh karena itu, penulis akan meneliti dengan judul *“Kebijakan Kiai dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren Studi Multisitius di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Udanawu dan Pondok Pesantren Darussalam Campurdarat Tulungagung”*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian di fokuskan pada adalah kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Dari fokus penelitian tersebut, dapat dijabarkan menjadi pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba’ul Hikam Udanawu Blitar dan Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung ?

2. Bagaimana implementasi kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar dan Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung ?
3. Bagaimana evaluasi dari kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar dan Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu dan Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu dan Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi dari kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar dan Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya penelitian untuk mendapatkan suatu manfaat-manfaat, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat bersifat teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmiah dan juga pengembangan teori tentang formulasi kebijakan kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, implementasi kebijakan kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren dan evaluasi kebijakan kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren.

b. Manfaat bersifat praktis

Penelitian tentang kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Ponpes Mamba'ul Hikam Udanawu dan Ponpes Darussalam Campurdarat Tulungagung memperoleh manfaat praktis yaitu:

a. Bagi Pengasuh (Kiai)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengasuh pesantren tentang kebijakan-kebijakan yang bersifat progresif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di pesantren.

b. Bagi Dewan Assatidz

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi dewan assatidz tentang implementasi kebijakan Kiai sebagai pedoman

sistem pendidikan di pesantren yang menjadi tonggak utama peningkatan mutu pendidikannya.

c. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di bidang manajemen pendidikan Islam terutama yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan pondok pesantren.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori terkait kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren juga menjadi acuan dan pembanding dengan topik dan fokus pada medan kasus lain untuk memperkaya temuan-temuan penelitian.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penyusunan laporan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan definisi yang tepat dan batasan istilah yang digunakan agar tidak terjadi penafsiran yang salah, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah dalam judul penelitian "Kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren (Studi multi situs di PP. Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar dan PP. Darussalam Campurdarat

Tulungagung)”, maka perlu adanya definisi istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

- a. Kebijakan Kiai adalah seluruh proses dan hasil perancangan dan penentuan beberapa langkah strategis yang dijabarkan dari visi misi pendidikan pesantren. Pada hal ini bertujuan untuk mewujudkan agar tercapainya tujuan pendidikan pesantren dalam kurun waktu tertentu.²²
- b. Mutu Pendidikan Pesantren merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan lingkungannya.²³ Mutu pendidikan di pesantren sangat ditentukan oleh pemimpin salah satunya figure seorang kiai yang berperan penting dalam pengelolaan pesantren. Pondok pesantren yang bermutu harus mampu membawa perubahan ke depan menjadi pesantren yang lebih bermutu dari segi pembelajaran, tenaga pendidik dan sarana prasarana sebagai komponen pendukung peningkatan mutu pendidikan pesantren sehingga juga bisa menarik simpati masyarakat.²⁴

2. Penegasan Operasional

Kebijakan Kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren dalam tesis ini adalah penelitian yang membahas kebijakan pimpinan pondok pesantren yakni Kiai dengan menggunakan konsep kebijakan yang

²² H.A.R.Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 140

²³ M.N Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 28.

²⁴ Muhkammad Abdullah, *Manajemen dan Kepemimpinan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), 3

diawali dengan formulasi kebijakan, kemudian implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan sehingga memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu dan Pondok Pesantren Darussalam Campurdarat Tulungagung.

Jadi penegasan secara operasional dalam tesis yang berjudul “Kebijakan kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren” ini dimaksudkan untuk mengetahui:

- a. Formulasi kebijakan kiai merupakan peramalan atau prediksi masa depan (dengan melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal Pondok Pesantren) guna menyikapi temuan dalam penyusunan agenda. Formulasi juga berarti memberikan suatu informasi terhadap *Policy Maker* tentang konsekuensi kebijakan yang telah dibuat di masa depan. Aktifitas tersebut tentu sangat berkaitan dengan tahapan formulasi kebijakan yakni perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan.
- b. Implementasi kebijakan kiai merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Hal ini berupa kegiatan untuk menimbulkan hasil, dampak, manfaat, serta dampak yang dirasakan oleh *stakeholder* pondok pesantren
- c. Evaluasi kebijakan kiai merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang ditetapkan oleh kiai. Dalam evaluasi tentunya diukur seberapa efektif kebijakan tersebut diimplementasikan.

Hal ini tentunya akan menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan kedepannya.